

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 113 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS ESELON II  
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan operasional di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa dengan adanya penambahan kendaraan roda empat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta untuk menjamin tertibnya pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan dinas;
  - c. bahwa nama yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai penanggungjawab kendaraan dinas pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu menetapkan keputusan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penanggungjawab Kendaraan Dinas Eselon II.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
  5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS ESELON II PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini sebagai penanggungjawab kendaraan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan kegiatan operasional dinas maka pemeliharaan menjadi tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Kerusakan kendaraan dinas yang disebabkan karena penggunaan diluar kepentingan dinas maka menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : ..13.. Mei 2016  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH



AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
: 113 TAHUN 2016  
: 13 Mei 2016

No.	PENANGGUNGJAWAB	JABATAN	KENDARAAN			KETERANGAN
			JENIS	MEREK/TIPE	NO POLISI	
1	Iwan Herniwan	Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana	Roda 4	Honda/CR-V 2.4 AT	B 2025 FQ	
2	Dwi Wahyuni Kartianingsih	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Roda 4	Toyota/Innova 2.0V MT	B 1956 SQP	
3	R.Fendy Dharmasaputra	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	Roda 4	Toyota/Innova 2.0V MT	B 1959 SQP	
4	Fadli Arif	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Roda 4	Toyota/Innova 2.0V MT	B 1958 SQP	
5	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Roda 4	Honda/CR-V 2.4 AT	B 2030 FQ	
6	Gusmelinda Rahmi	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Roda 4	Toyota/Innova 2.0V MT	B 1963 SQP	
7	Sutan Suangkupon Lubis	Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Roda 4	Toyota/Innova 2.0V MT	B 1961 SQP	
8	Emin Adhi Muhaemin	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	Roda 4	Toyota/Innova 2.0V MT	B 1955 SQP	
9	Gatot Pambudhi Poetranto	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Roda 4	Toyota/Innova 2.0V MT	B 1954 SQP	
10	Reifeid	Direktur Pengembangan Profesi	Roda 4	Toyota/Innova 2.0V MT	B 1953 SQP	
11	Tatang Rustandar Wiratmadja	Direktur Pelatihan Kompetensi	Roda 4	Toyota/Innova 2.0V MT	B 1962 SQP	
12	Suharti	Direktur Sertifikasi Profesi	Roda 4	Honda/CR-V 2.4 AT	B 2108 FQ	
13	Yulianto Prihandoyo	Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sengkah Wilayah I	Roda 4	Honda/CR-V 2.4 AT	B 2063 FQ	
14	M. Aris Supriyanto	Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sengkah Wilayah II	Roda 4	Honda/CR-V 2.4 AT	B 2029 FQ	
15	Setya Budi Arjanta	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	Roda 4	Toyota/Innova 2.0V MT	B 1957 SQP	
16	Rita Berlis	Inspektur	Roda 4	Toyota/Innova 2.0V MT	B 1960 SQP	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO